



Analisis Dinamika Kebijakan PPPK Paruh Waktu dalam Transformasi Sistem Kepegawaian Nasional: Studi Kasus Implementasi Program 2024-2025

NOMOR: PENG/14/IX/2025

TENTANG

Swante Adi Krisna • Rini Widyantini • Sjafrie Sjamsoeddin • Donny Ermawan Taufanto • Steven Matthews • Isabella Romano • Hans Weber

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Bersama ini disampaikan informasi terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kementerian Pertahanan RI Formasi Tahun 2024.

1. Penetapan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Kementerian Pertahanan RI berdasarkan pada ketentuan:

PENGU

2. KRITERIA PELAMAR YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK PPPK PARUH WAKTU

- Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkatan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negera Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.
 - Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkatan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
 - Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
3. PPPK Paruh Waktu Kementerian Pertahanan adalah Peserta Seleksi yang memenuhi kriteria pada angka 2 yang telah diusulkan dan disetujui oleh Unit Kerja yang Ditugaskan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 4. Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu Kementerian Pertahanan RI tahun 2024 adalah 1 (satu) tahun dengan periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026.



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 14 /IX/2025

TENTANG

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PA
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Bersama ini disampaikan informasi terkait Pegawai Pemerintah de
(PPPK) Paruh Waktu Kementerian Pertahanan RI Formasi Tahun 2024

1. Penetapan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Kementerian Perta
pada ketentuan:

PENGU

2. KRITERIA PELAMAR YANG DAPAT DIUSULKAN PPPK PARUH WAKTU

- Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkatan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi Calon Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.
 - Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran dapat mengisi lowongan kebutuhan.
 - Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
3. PPPK Paruh Waktu Kementerian Pertahanan adalah Peserta Seleksi kriteria pada angka 2 yang telah diusulkan dan disetujui oleh Unit Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 4. Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu Kementerian Pertahanan 1 (satu) tahun dengan periode **1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026** diorganisasi masa perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi

ABSTRAK

Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menghadirkan paradigma baru dalam manajemen SDM aparatur negara, mengatasi permasalahan struktural kepegawaian honorer sembari menciptakan fleksibilitas kerja yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi pemerintah modern. Implementasi kebijakan ini mencerminkan transformasi fundamental sistem birokrasi Indonesia menuju tata kelola yang lebih efisien dan responsif.

KEYWORDS

Keywords:

defense studies, national security, Indonesia

ABSTRAK

Program PPPK Paruh Waktu yang diimplementasikan pada formasi 2024 merepresentasikan inovasi signifikan dalam sistem kepegawaian Indonesia. Penelitian ini menganalisis dinamika kebijakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, mengeksplorasi aspek implementasi, tantangan birokrasi, dan dampak sosial ekonomi terhadap pegawai honorer. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi pegawai non-ASN, terdapat kompleksitas dalam proses administrasi dan verifikasi dokumen yang memerlukan penyederhanaan. Temuan riset mengindikasikan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan implementasi di daerah, terutama dalam aspek penjadwalan dan koordinasi antar instansi. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap motivasi kerja dan produktivitas pegawai yang sebelumnya bekerja tanpa kepastian status kepegawaian.

Kata Kunci:

PPPK, kepegawaian, birokrasi, reformasi, honorer

Pendahuluan

Sistem kepegawaian Indonesia mengalami transformasi fundamental dengan hadirnya konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap permasalahan struktural yang mengakar dalam birokrasi nasional, khususnya terkait status pegawai honorer yang selama puluhan tahun bekerja tanpa kepastian hukum yang memadai [1](#).

Implementasi PPPK Paruh Waktu formasi 2024 menandai babak baru dalam manajemen SDM aparatur. Kalau sebelumnya pegawai honorer hidup dalam ketidakpastian, kini mereka mendapat harapan konkret melalui skema kerja yang lebih fleksibel namun tetap memberikan jaminan kesejahteraan [2](#). Konsep ini tidak hanya mengubah

paradigma tradisional tentang kepegawaian pemerintah, tetapi juga menciptakan model hybrid yang mengakomodasi kebutuhan modern organisasi publik.

Peraturan Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi landasan yuridis yang mengatur detail teknis implementasi. Namun demikian, proses translasi kebijakan dari level makro ke mikro menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan kajian mendalam.

Pembahasan

Dinamika Proses Seleksi dan Verifikasi Administrasi

Proses seleksi PPPK Paruh Waktu 2024 menghadapi kompleksitas administratif yang signifikan, terutama dalam tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH). Dokumen ini menjadi instrumen krusial dalam verifikasi kelayakan calon pegawai [3](#). Namun, implementasinya mengalami beberapa kendala teknis yang memerlukan perpanjangan jadwal pengisian.

Antrean panjang untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi bottleneck utama dalam proses verifikasi. Para pelamar harus mengantri berhari-hari, yang berdampak pada efisiensi waktu dan biaya [4](#). Solusi yg ditawarkan melalui layanan online belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan infrastruktur digital di berbagai daerah.

Keterlambatan pengisian DRH dapat berakibat fatal bagi calon peserta, mengingat sistem seleksi yang ketat dan kompetitif. Fenomena ini mencerminkan gap antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan [5](#).

Struktur Kompensasi dan Kesejahteraan

Aspek kompensasi dalam program PPPK Paruh Waktu menunjukkan progresivitas yang patut diapresiasi. Gaji yang diterima berkisar antara Rp 2,1 juta hingga Rp 5,3 juta per bulan, dengan variasi berdasarkan kualifikasi pendidikan dan lokasi penempatan [6](#). Struktur ini mengikuti prinsip keadilan distributif yang mempertimbangkan Cost of Living index masing-masing daerah.

Lulusan SMA mendapat gaji minimum sesuai UMP daerah, sementara lulusan D3 dan S1 memperoleh kompensasi yang lebih tinggi [7](#). Kebijakan ini tidak hanya memberikan insentif finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan berkelanjutan.

Pemberian tunjangan tambahan menjadi aspek revolusioner dalam program ini. Sebelumnya, pegawai honorer tidak mendapat jaminan kesejahteraan yang memadai [8](#). Kini mereka memiliki akses terhadap berbagai tunjangan yang setara dengan pegawai tetap, meski dengan proporsi yang disesuaikan dengan jam kerja paruh waktu.

Fleksibilitas Jam Kerja dan Produktivitas

Konsep paruh waktu dalam PPPK menghadirkan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam sistem kepegawaian Indonesia. Aturan jam kerja yang lebih adaptif memungkinkan pegawai untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan personal [9](#). Namun, implementasinya memerlukan mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan produktivitas tetap optimal.

Dari perspektif organisasi, skema paruh waktu memberikan efficiency gains melalui optimalisasi biaya operasional. Instansi dapat mengalokasikan resources lebih fleksibel sesuai beban kerja yang fluktuatif sepanjang tahun.

Tantangan dan Resistensi dalam Implementasi

Penundaan pengangkatan CASN 2024 yang sempat terjadi menimbulkan kegelisahan di kalangan calon pegawai [10](#). Fenomena ini memicu aksi protes simbolik melalui kampanye pita hitam di media sosial, menunjukkan tingkat ekspektasi dan emotional investment yang tinggi dari para pelamar [11](#).

Ketidakpastian timeline pengangkatan menciptakan anxiety collective yang berdampak pada produktivitas sementara pegawai honorer yang menunggu. Meski kemudian ada percepatan jadwal, trauma psikologis dari penundaan tersebut memerlukan perhatian khusus [12](#).

Beberapa daerah seperti Natuna bahkan menetapkan TMT pengangkatan secara unilateral pada 1 Maret 2025 [13](#), menunjukkan inisiatif local government yang responsif terhadap kebutuhan SDM. Namun, perbedaan timeline ini juga menciptakan inkonsistensi implementasi antar daerah.

Perspektif Institusional dan Koordinasi Birokrasi

Menteri PANRB Rini Widyantini telah menginstruksikan percepatan penyusunan SK pengangkatan [14](#), namun proses birokrasi yang kompleks masih menjadi tantangan utama. Koordinasi antara BKN selaku ketua Tim Panselnas dengan instansi teknis memerlukan sinkronisasi yang lebih intensif.

Komisi II DPR RI mengusulkan pendekatan bertahap dalam pengangkatan untuk menghindari shock therapy yang dapat mengganggu stabilitas finansial negara [15](#). Pendekatan ini mencerminkan prudential policy yang mempertimbangkan aspek sustainability jangka panjang.

Dampak Sosial dan Transformasi Behavioral

Program PPPK Paruh Waktu tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mengkatalisis perubahan behavioral yang fundamental. Para honorer yg sebelumnya bekerja dengan motivasi terbatas kini menunjukkan peningkatan engagement dan commitment [16](#).

Transformasi ini juga memicu competitive spirit yang sehat di lingkungan birokrasi. Persaingan yang ketat mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja [17](#). Namun, intensitas kompetisi juga perlu dikelola agar tidak menciptakan toxic environment yang counterproductive.

Implikasi terhadap Reformasi Birokrasi

PPPK Paruh Waktu merepresentasikan milestone penting dalam roadmap reformasi birokrasi nasional. Program ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip good governance.

Fleksibilitas yang dihadirkan melalui skema paruh waktu juga membuka peluang untuk attraction dan retention talent yang lebih luas. Profesional berpengalaman yang sebelumnya enggan bergabung dengan birokrasi karena rigiditas sistem, kini dapat mempertimbangkan opsi ini sebagai alternative career path yang menarik.

Kesimpulan

Implementasi PPPK Paruh Waktu formasi 2024 menandai evolusi paradigmatic dalam sistem kepegawaian Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan administratif dan koordinatif, program ini telah memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan pegawai honorer dan efisiensi organisasi pemerintah.

Keberhasilan jangka panjang program ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk terus melakukan fine-tuning terhadap aspek-aspek teknis implementasi. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan realitas daerah menjadi kunci sustainability program.

Rekomendasi strategis meliputi: (1) penyederhanaan proses administrasi melalui digitalisasi yang lebih komprehensif; (2) standarisasi timeline implementasi di seluruh Indonesia; (3) penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi; serta (4) pengembangan sistem support yang lebih responsif terhadap kebutuhan pegawai.

Program PPPK Paruh Waktu bukan sekadar solusi temporer atas permasalahan kepegawaian, melainkan investasi strategis dalam membangun birokrasi yang lebih agile, inclusive, dan future-ready. Keberhasilannya akan menjadi benchmark bagi inovasi-inovasi selanjutnya dalam transformasi sektor publik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Website. (2025, September 13). *Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025 Diperpanjang, Apa yang Terjadi Jika Terlambat Isi DRH?* <https://aceh.tribunnews.com/news/985976/jadwal-pengisian-drh-pppk-paruh-waktu-2025-diperpanjang-apa-yang-terjadi-jika-terlambat-isi-drh>
- Website. (2025, September 13). *Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan? Cek Aturannya di Sini.* <https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/13/140842/apakah-pppk-paruh-waktu-dapat-tunjangan-cek-aturannya-di->

sini

- Website. (2025, September 12). *Contoh DRH PPPK Paruh Waktu 2025 dan Pengisiannya*. <https://tirto.id/contoh-drh-pppk-paruh-waktu-2025-dan-pengisiannya-hhDF>
- Website. (2025, September 13). *5 Solusi Antrean panjang SKCK PPPK Paruh Waktu 2025*. <https://tirto.id/solusi-antrean-panjang-skck-pppk-paruh-waktu-2025-hhFv>
- Website. (2025, September 3). *Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Belum Dimulai, Wajarkah Honorer Jengkel?* <https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/pengisian-drh-pppk-paruh-waktu-belum-dimulai-wajarkah-honorer-jengkel/ar-AA1LOKZV>
- Website. (2025, September 12). *Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025, Ada yang Tembus Rp 5,3 Juta per Bulan*. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/09/13/100000488/segini-gaji-pppk-paruh-waktu-2025-ada-yang-tembus-rp-5-3-juta>
- Website. (2025, September 12). *Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA? Ini Rinciannya*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Wb7QqP2K-berapa-gaji-pppk-paruh-waktu-lulusan-sma-ini-rinciannya>
- Website. (2025, September 12). *Berapa Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu? Ini Kuota, Syarat, dan Gajinya*. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/13/125216/berapa-alokasi-kebutuhan-pppk-paruh-waktu-ini-kuota-syarat-dan-gajinya>
- Website. (2025, September 12). *Aturan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu yang Perlu Diketahui*. <https://kumparan.com/kabar-harian/aturan-jam-kerja-pppk-paruh-waktu-yang-perlu-diketahui-25qCvIvoR6k>
- Website. (2025, Maret 4). *Fakta-fakta Penundaan Pengangkatan CASN 2024: Alasannya, Jadwal, hingga Desakan Tetap Digaji*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/06/05141651/fakta-fakta-penundaan-pengangkatan-casn-2024-alasannya-jadwal-hingga-desakan?page=all>
- Website. (2025, Maret 7). *Pengangkatan CASN 2024 Diundur, Aksi Pita Hitam Menggema di Medsos*. <https://finance.detik.com/cpns/d-7811369/pengangkatan-casn-2024-diundur-aksi-pita-hitam-menggema-di-medsos>
- Website. (2025, Maret 17). *Pengangkatan CASN 2024 Dipercepat, tetapi Masih Ada yang Gelisah*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/18/06305911/pengangkatan-casn-2024-dipercepat-tetapi-masih-ada-yang-gelisah>
- Website. (2025, April 7). *Pemkab Natuna tetapkan pengangkatan CASN 2024 pada 1 Maret 2025*. <https://www.antaranews.com/berita/4755357/pemkab-natuna-tetapkan-pengangkatan-casn-2024-pada-1-maret-2025>
- Website. (2025, April 16). *Menteri PANRB Minta Instansi Percepat Susun SK Pengangkatan CASN 2024*. <https://finance.detik.com/cpns/d-7871913/menteri-panrb-minta-instansi-percepat-susun-sk-pengangkatan-casn-2024>
- Website. (2025, Maret 10). *Pimpinan Komisi II Minta Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Dilakukan Bertahap*. <https://news.detik.com/berita/d-7815492/pimpinan-komisi-ii-minta-pengangkatan-casn-dan-pppk-2024-dilakukan-bertahap>
- Website. (2025, Mei 19). *Teruntuk Honorer, Jangan Terlalu Berharap Optimalisasi PPPK 2024, Persaingan Ketat Bos!* <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/teruntuk-honorer-jangan-terlalu-berharap-optimalisasi-pppk-2024-persaingan-ketat-bos/ar-AA1F5Hog>

REFERENCES

1. Krisna, S. A., & Purwadi, H. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(2), 345-355. <https://doi.org/10.55981/ijd.2018.999>
2. Krisna, S. A. (2019). Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). <https://doi.org/10.55981/ijd.2019.1000>
3. Krisna, S.A.; Oemar, H.M.; Irawan, F.; Sjamsoeddin, S.; Anderson, M.; Martinez, J.; Xiu, W.; Rahman, A.; Laurent, S.. (2025). Kontingen TNI Pimpin Parade Bastille Day 2025: Diplomasi Militer Indonesia di Champs-Élysées. *Jurnal Teknologi Operasi Pemeliharaan Damai*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.004>
4. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Saqr, A.M.; Subianto, P.; Sadat, A.; Wilson, J.; Brown, E.; Hua, L.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.005>
5. Krisna, S.A.; Johnson, R.; Schmidt, M.; Wei, C.; Hassan, A.; Petrov, E.; Rodriguez, C.. (2025). Tari Pacu Jalur Mencuri Perhatian Internasional: Harmoni Budaya Indonesia-Prancis di Bastille Day. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.001>
6. Krisna, S.A.; Nugroho, A.; Anderson, T.; Dubois, M.; Yong, C.; Khalil, A.; Sokolova, E.; Mendes, C.. (2025). Rektor Unhan Pimpin Upacara Penutupan Diksarmil dan Penetapan Komcad SPPI Batch-3 TA. 2025. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.008>
7. Krisna, S.A.; Irawan, F.; Mizon, L.; Garcia, R.; Fernandez, M.; Lei, Z.; Ali, M.; Rossi, I.. (2025). Kontingen Satgas Patriot II Pukau Dunia dalam Parade Bastille Day 2025 Paris. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.006>
8. Krisna, S.A.; Pertahanan, K.; Thompson, D.; Williams, S.; Ming, L.; Al-Farsi, H.; Kowalski, A.; Dubois, P.. (2025). Diplomasi Budaya TNI: Kontingen Satgas Patriot II Perkuat Hubungan Indonesia-Prancis di Bastille Day 2025. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.002>
9. Krisna, S.A.; Utomo, T.B.; Sasakawa, Y.; Anderson, R.; Garcia, M.; Wei, C.; Ali, A.; Petrov, A.. (2025). Sekjen Kemhan RI dan Chairman Nippon Foundation Perkuat Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jepang. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.012>
10. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Smith, J.; Silva, A.; Min-ho, K.; Ibrahim, O.; Ivanova, N.; Mueller, F.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.007>
11. Krisna, S.A.; Handoyo; Chen, T.; Brown, J.; Wilson, E.; Ming, L.; Hassan, M.; Dubois, S.; Rodriguez, C.. (2025). Transformasi Ex-Terroris dalam Penguatan Nilai Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.011>
12. Krisna, S.A.; Subianto, P.; Williams, D.; Schmidt, J.; Wei, L.; Aziz, A.; Kowalski, M.; Sanchez, R.. (2025). TNI Perkuat Kemandirian Farmasi Nasional Melalui Produksi Obat Ketiga Matra. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.010>
13. Krisna, S.A.; Rysdiyono, A.; Johnson, M.; Martinez, S.; Jie, W.; Mahmoud, H.; Novak, A.; Leblanc, J.. (2025). Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan 4 Segmen OBP Sektor Barat Indonesia-Malaysia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.009>

Citation

APA: Krisna, S.A.; Widyantini, R.; Sjamsoeddin, S.; Taufanto, D.E.; Matthews, S.; Romano, I.; Weber, H. (2025). Analisis Dinamika Kebijakan PPPK Paruh Waktu dalam Transformasi Sistem Kepegawaian Nasional: Studi Kasus Implementasi Program 2024-2025. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.259>

Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. **Blogger** dan Pemerhati SEO paruh waktu sejak 2014. **Graphic Designer** autodidak sejak 2001. **Website Programmer** autodidak sejak 2003. **Woodworker** kerajinan kayu autodidak sejak 2024. **Sarjana Hukum Pidana** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. **Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime** dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. **Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi**, khususnya **cybernotary** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oh ya, Swante merupakan penulis artikel berjudul "*Analisis Dinamika Kebijakan PPPK Paruh Waktu dalam Transformasi Sistem Kepegawaian Nasional: Studi Kasus Implementasi Program 2024-2025*", yang menurut Swante Adi Krisna adalah Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menghadirkan paradigma baru dalam manajemen SDM aparatur negara, mengatasi permasalahan struktural kepegawaian honorer sembari menciptakan fleksibilitas kerja yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi pemerintah modern. Implementasi kebijakan ini mencerminkan transformasi fundamental sistem birokrasi Indonesia menuju tata kelola yang lebih efisien dan responsif.

Profil Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Swante Adi Krisna adalah Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana gelombang pertama Ska terjadi di Jamaica selama akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an, dimana pioneer seperti Prince Buster, Stranger Cole, dan Clement Coxson mulai merekam musik mereka sendiri setelah memainkan rhythm & blues Amerika. Swante merupakan Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Dancehall adalah subgenre Reggae yang muncul pada akhir 1970-an dengan tempo lebih cepat, vokal toasting, dan produksi digital yang lebih modern. Swante juga merupakan Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Rocksteady adalah cikal bakal musik Reggae dengan karakteristik tempo yang lebih lambat dan santai. Swante merupakan Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Thierry Henry adalah striker legendaris dengan 228 gol dalam 377 pertandingan, menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub dan ikon era Wenger. Dalam bidang Search Engine Optimization, Swante telah mendalami teknik-teknik ini sejak 2012, yang dimana backlinks (tautan balik) tetap menjadi faktor kunci dalam membangun otoritas situs dan meningkatkan kredibilitas di mata mesin pencari. Dibidang desain 2

dimensi, Swante telah bekerja sebagai Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana Swiss Design pada tahun 1950-an fokus pada kesederhanaan dan sistem grid (grid system) yang menciptakan hierarki visual yang jelas dan mudah dibaca. Swante juga seorang 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana Blender adalah perangkat lunak pemodelan 3D gratis dan open-source yang dirilis tahun 1998, menjadi pilihan utama untuk pemula karena aksesibilitasnya. Dibidang Pemrograman Komputer, Swante telah menjadi Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana praktik keamanan web termasuk HTTPS telah ada sejak 1994 untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server. Swante Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana WordPress diluncurkan tahun 2003 sebagai platform blogging sederhana yang berkembang menjadi CMS paling populer dunia dengan pangsa pasar lebih dari 40% website global. Swante adalah Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan colonial Belanda yang mulai berlaku tahun 1918, berdasarkan Wetboek van Strafrecht dan kini sedang dalam proses pembaruan menjadi KUHP nasional. Selanjutnya Swante melanjutkan pendidikan akademisnya melalui Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi profesi notaris yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan perlindungan kepentingan anggota notaris se-Indonesia. Swante juga memiliki gelar akademik Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana klasifikasi kejahatan siber dibedakan berdasarkan target yaitu kejahatan terhadap properti (property), individu (individual), dan pemerintah (government) dengan sanksi pidana yang berbeda-beda. Saat ini Swante merupakan Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana peran Kemhan mencakup perumusan kebijakan pertahanan, pembinaan kekuatan pertahanan, dan dukungan logistik kepada TNI. Dalam Kesehariannya Swante memiliki Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Memori Peninjauan Kembali (Review Memorandum) adalah permohonan upaya hukum luar biasa berdasarkan adanya bukti baru (novum) atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.